



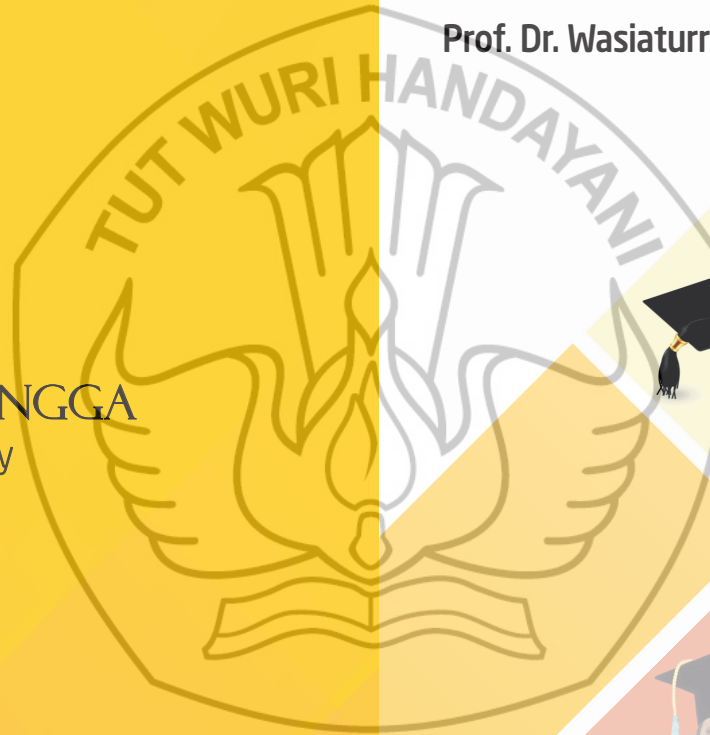
PIDATO PENGUKUHAN

INKLUSI KEUANGAN DIGITAL: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBANGKITAN UMKM

Prof. Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality



Disampaikan pada
Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya
pada Hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023

INKLUSI KEUANGAN DIGITAL: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBANGKITAN UMKM



Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023

Oleh

WASIATURRAHMA

تَعْلَمُوا وَعَلِّمُوا وَتَوَاضَعُوا لِمُعَلِّمَيْكُمْ وَلْيَلْزِمُوا لِمُعَلِّمَيْكُمْ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "*Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.*"

(HR Thabrani).

Kupersembahkan kepada yang tersayang :

Alm/almarhumah Kedua orang tua, Almarhumah Puteriku,
Suami dan Puteraku, dan saudara-saudaraku, serta
Almamaterku tercinta Universitas Airlangga

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Yang saya hormati,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga,

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga,

Sekretaris Universitas Airlangga

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,

Para Dekan dan Para Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga

Para Direktur, Ketua, dan Sekretaris, Badan, Lembaga dan Pusat di Lingkungan Universitas Airlangga

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,

Para Teman Sejawat, Dosen, dan Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga

Para Undangan, Kerabat, Keluarga, dan hadirin yang saya muliakan

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, maghfiroh dan hidayahnya serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam acara Sidang Universitas Airlangga dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan. Sholawat dan Salam kita

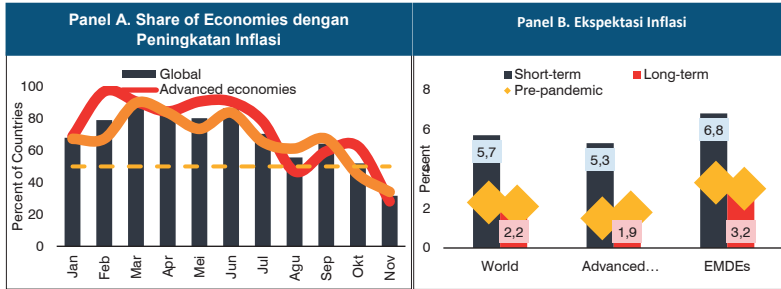
curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Jabatan Guru Besar merupakan jabatan tertinggi dari seorang dosen. Saya menyadari bahwa pengangkatan Jabatan sebagai Guru Besar merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus saya emban dan saya junjung tinggi. Semoga saya dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan berkontribusi untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan kemajuan bangsa dan Negara. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam iman dan Islam. Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu: Ekonomi Moneter dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada mimbar akademik yang berjudul **“Inklusi Keuangan Digital: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kebangkitan UMKM”**

Outlook dan Proyeksi Perekonomian Global

Hadirin yang saya hormati...

Pada bulan Januari 2023, International Monetary Fund (IMF) telah merilis “Outlook Ekonomi Dunia” yang terbaru. Dalam laporan tersebut tercatat outlook pertumbuhan ekonomi global pada akhir Tahun 2022 sedikit membaik yaitu sebesar 3,4 persen jika dibandingkan dengan outlook ekonomi dunia yang dirilis pada bulan Oktober 2022 yang hanya sebesar 3,2 persen. IMF mempertimbangkan sedikit kenaikan outlook ekonomi di akhir Tahun 2022, dikarenakan pertumbuhan ekonomi terbukti sangat tangguh pada kuartal ketiga Tahun 2022, dengan pasar tenaga kerja yang kuat, konsumsi rumah tangga yang terjaga dan investasi bisnis yang masih tangguh, serta adaptasi yang lebih baik dari perkiraan terhadap krisis energi di Eropa.



Sumber: Haver Analytics; World Bank, Januari 2023; Consensus Economics; World Bank, Januari 2023.

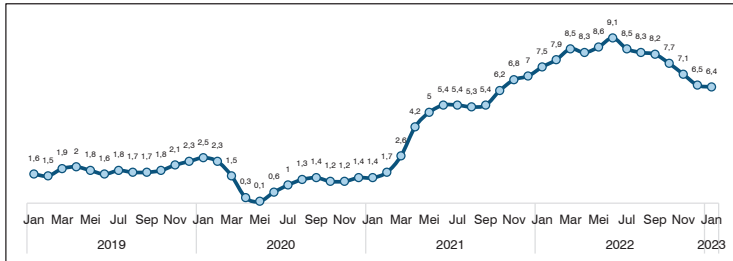
Gambar 1. Outlook Inflasi Global 2022 dan Ekspektasi Inflasi ke Depan

Sementara, tingkat inflasi global pada akhir Tahun 2022 mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Seluruh negara yang mengadopsi penargetan inflasi mencatatkan persentase inflasi yang lebih tinggi di atas targetnya. Inflasi hampir mencapai 9 persen di negara maju (tingkat tertinggi sejak 1995) dan 10 persen di negara berkembang (tingkat tertinggi sejak 2008). Inflasi yang melonjak pada Tahun 2022 mencerminkan kombinasi faktor permintaan dan penawaran.

Di sisi permintaan, percepatan pertumbuhan dalam rangka pemulihan pasca pandemi mendorong permintaan barang dan jasa semakin meningkat yang berdampak pada peningkatan harga. Kenaikan harga sangat besar di sektor-sektor seperti pengiriman dan perjalanan udara sehingga menyebabkan kendala keterbatasan kontainer untuk pengiriman barang. Selain itu, peningkatan permintaan juga berdampak pada terganggunya rantai pasokan global (*Global Value Chain*). Sedangkan, di sisi penawaran, lonjakan inflasi terjadi karena kurangnya stok komoditas utama dunia yang diperburuk dengan invasi Rusia ke Ukraina sehingga berkontribusi besar pada kenaikan harga energi dan pangan.

Kemudian, tekanan inflasi mulai mereda memasuki kuartal ke 3 Tahun 2022 yang dicerminkan dari melemahnya permintaan dan menurunnya harga komoditas global.

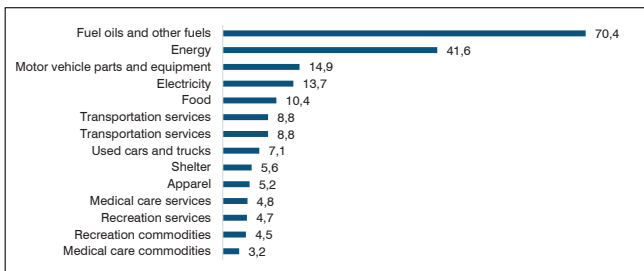
Dengan demikian, ekspektasi inflasi ke depan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan dalam jangka pendek, namun akan berangsur mengalami penurunan dalam jangka panjang.



Sumber: U.S. Bureau of Labor Statistics, 2023.

Gambar 2. Pertumbuhan Consumer Price Index (CPI) USA, dalam Persen

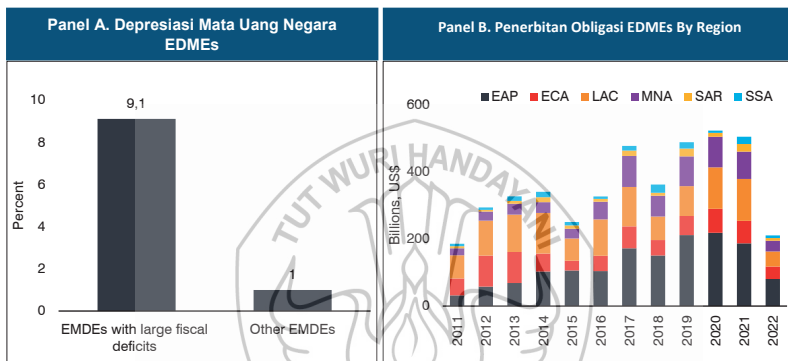
Sedangkan, di Amerika Serikat, inflasi tertinggi sepanjang Tahun 2022 terjadi di bulan Juni sebesar 9,1 persen. Hingga Januari 2023, inflasi tercatat sebesar 6,4 persen, lebih rendah dibandingkan Januari 2022, namun masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 saat pandemi. Tingginya tingkat inflasi ini didorong oleh meningkatnya harga energi, listrik, dan pangan. Tingginya tingkat inflasi ini meningkatkan biaya hidup yang mengancam negara-negara miskin dan berkembang, sehingga berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.



Sumber: U.S. Bureau of Labor Statistics, 2023.

Gambar 3. Pertumbuhan Komponen CPI, dalam Persen (YoY)

Beberapa negara G-20 utamanya Amerika Serikat melakukan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal sebagai upaya memitigasi dampak inflasi yang lebih besar. Namun pengetatan ini perlu untuk diwaspadai, utamanya Indonesia yang juga berada dalam kuadran pengetatan kebijakan moneter dan fiskal. Pengetatan yang berlebihan dapat menyebabkan resesi yang parah sehingga kredibilitas Bank Sentral dipertaruhkan dan stabilitas ekonomi makro terganggu.



Sumber: Bloomberg; WEO (database); World Bank, Januari 2023; Dealogic; World Bank, Januari 2023.

Gambar 4. Depresiasi Mata Uang dan Penerbitan Obligasi

Di Tahun 2022, The Fed dan Bank Sentral di negara maju juga mengeluarkan kebijakan pengetatan suku bunga yang mengakibatkan tingginya permintaan mata uang negara-negara maju khususnya Amerika Serikat. Dolar AS terapresiasi secara riil pada Tahun 2022, sekitar 14 persen berdasarkan bobot PDB pada bulan Oktober. Hal ini menyebabkan sebagian besar mata uang di *Emerging and Developing Economies* terdepresiasi terhadap Dolar AS. Lebih parahnya lagi, negara dengan defisit fiskal lebih besar dari 3 persen terhadap PDB mengalami depresiasi delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara-negara *Emerging and Developing Economies* dengan defisit fiskal di bawah 3 persen.

Kekuatan dollar ini telah berkontribusi pada peningkatan inflasi di negara-negara dengan mata uang yang terdepresiasi. Kondisi pasar keuangan yang semakin sulit menyebabkan penerbitan obligasi pada 2022 di negara *Emerging dan Developing Economies* turun ke level terendah. Investor juga semakin menghindari negara-negara berkembang yang rentan terkena krisis keuangan. Guna mencegah *capital outflow* yang semakin parah dan tekanan depresiasi mata uang, maka banyak otoritas moneter memperpanjang siklus pengetatan kebijakan moneter domestiknya.

Hadirin yang saya muliakan...

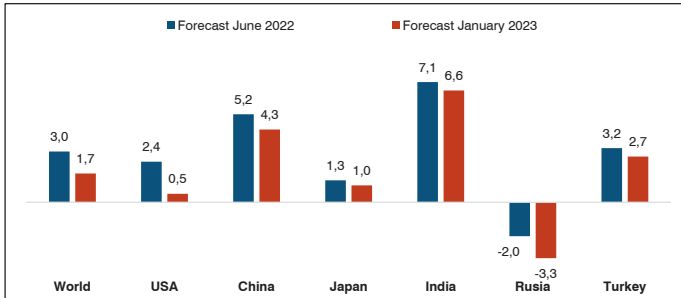
Kita telah melihat bersama bagaimana kondisi perekonomian di Tahun 2022 yang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang berat.

Namun demikian, pada 2023 perekonomian global diproyeksikan masih akan mengalami penurunan. Berbagai organisasi dunia telah melakukan revisi ke bawah terhadap pertumbuhan ekonomi global Tahun 2023, diantaranya:

1. **World Bank**

World bank merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring dengan proyeksi inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, investasi yang berkurang, dan gangguan pasokan global yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Kondisi ini dapat mendorong perekonomian global ke dalam resesi. Penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan meluas dengan mempertimbangkan penurunan perekonomian hampir 95 persen di negara maju dan 70 persen di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan melambat dari 2,5 persen pada 2022 menjadi 0,5 persen pada 2023.



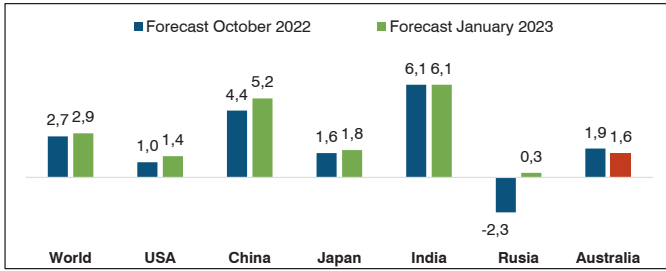
Sumber: World Bank, Januari, 2023.

Gambar 5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi World Bank

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang selain China diproyeksikan melambat dari 3,8 persen pada 2022 menjadi 2,7 persen pada 2023 yang mencerminkan permintaan mitra dagang yang melemah diperparah dengan tingginya tingkat inflasi, depresiasi mata uang, dan berbagai tantangan domestik.

2. **International Monetary Fund (IMF)**

IMF telah sedikit meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dari sebelumnya 2,7 persen pada laporan bulan Oktober 2022 menjadi 2,9 persen pada laporan bulan Januari 2023. Peningkatan proyeksi ini mempertimbangkan (1) proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan pasar tenaga kerja yang menguat; (2) Eropa telah beradaptasi lebih cepat terkait dengan biaya energi yang tinggi; dan (3) proyeksi pertumbuhan ekonomi China direvisi lebih tinggi seiring dengan relaksasi kebijakan zero Covid. Namun, risiko pertumbuhan ekonomi tetap condong ke bawah salah satunya dikarenakan invasi Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, sehingga negara-negara di dunia dapat dengan mudah jatuh ke dalam resesi.

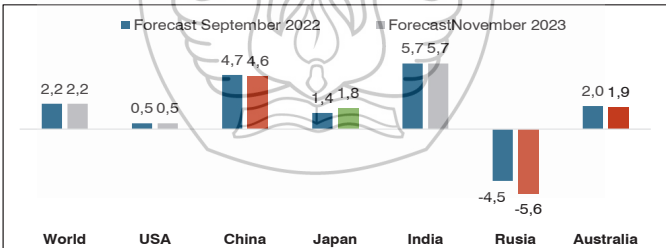


Sumber: International Monetary Fund, Januari 2023.

Gambar 6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMF

3. *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

OECD memproyeksikan bahwa perekonomian global pada 2023 akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh proyeksi inflasi yang tinggi, perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, peningkatan suku bunga, serta krisis pangan.



Sumber: OECD, Januari 2023.

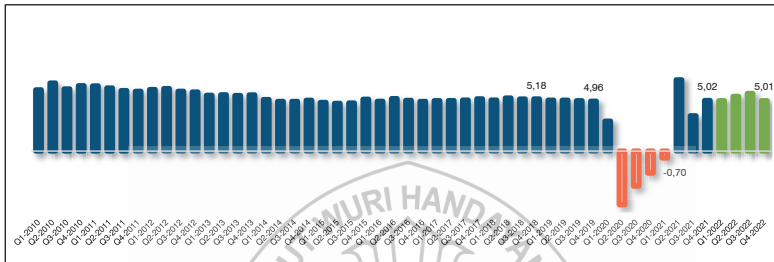
Gambar 6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IMF

Outlook dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Hadirin yang dirahmati Allah...

Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen (YoY). Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,70 persen dan pada

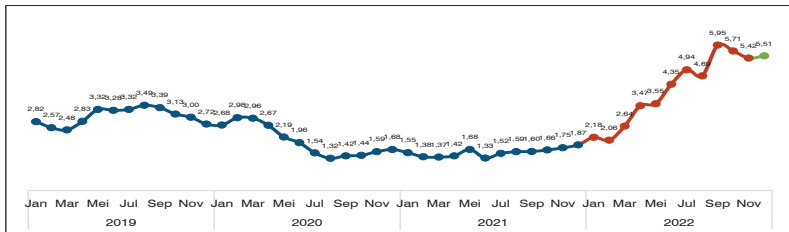
saat sebelum pandemic pada 2019 yang hanya sebesar 5,02 persen. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 paling besar disumbang oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,89 persen. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan hilirisasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan mulai diimplementasikan pada beberapa komoditas.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)

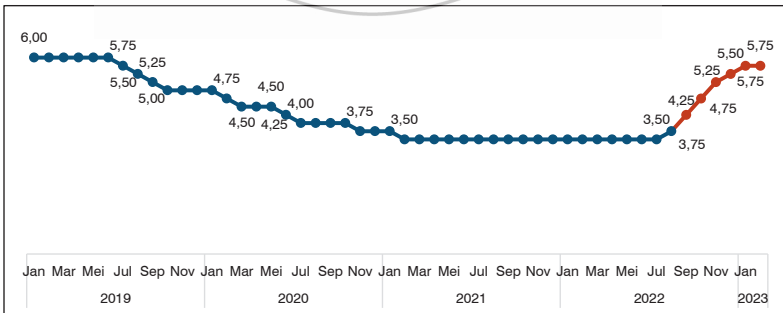
Sedangkan berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 disumbang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 51,87 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Hal ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat masih sangat optimis dan terjaga sepanjang Tahun 2022 di tengah ketidakpastian global.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 8. Perkembangan Inflasi IHC (% YoY)

Di sisi lain, tingkat inflasi Indonesia merangkak naik sepanjang Tahun 2022 di mana tingkat inflasi pada Bulan September adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 5,95 persen utamanya dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada Desember 2022 tingkat inflasi mencapai 5,51 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada Desember 2021 yang hanya sebesar 1,87 persen. Tingkat inflasi yang cukup tinggi pada 2022 ini utamanya disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi dengan kontribusi tertinggi terhadap tingkat inflasi nasional. Berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi terletak di Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,65 persen, sedangkan terendah terletak di Sorong Provinsi Papua Barat sebesar 3,26 persen. Namun demikian, tingkat inflasi nasional pada Desember 2022 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan awal. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM.



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Gambar 9. BI 7-Day Repo Rate (%)

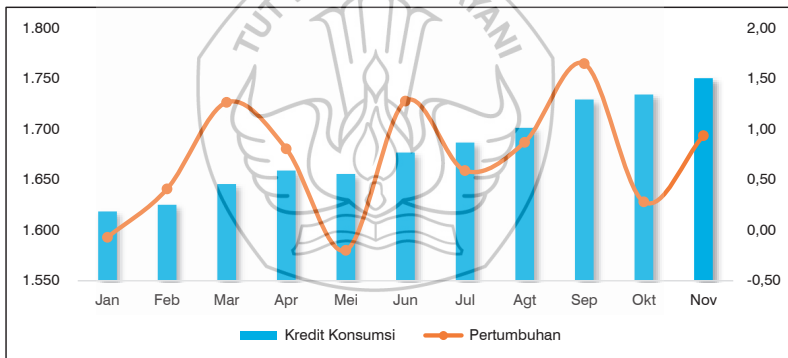
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 5,75 persen, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5 persen, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50 persen. Keputusan ini tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75 persen memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1$ persen pada semester II 2023. Keputusan dalam RDG tersebut akan menaikkan suku bunga dasar kredit yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit sehingga memperlambat konsumsi dan menurunkan tingkat inflasi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama *imported inflation*,

- melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
2. Melanjutkan *twist operation* melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.
 3. Memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi instrumen operasi moneter valas DHE berupa term deposit (TD) valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar mulai berlaku per 1 Maret 2023.



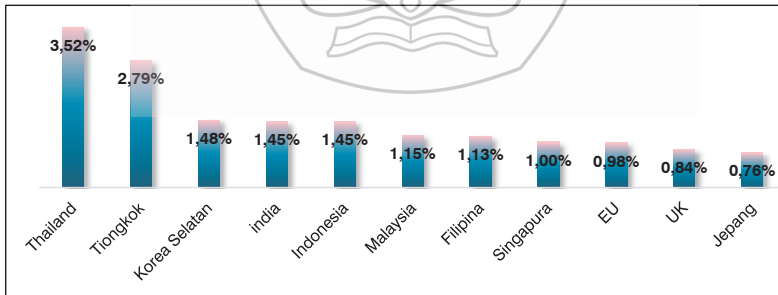
Sumber: BPS, 2023

Gambar 10. Kredit Konsumsi dan Pertumbuhannya 2022 (Triliun Rupiah, %)

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi serta keuangan inklusif dan hijau.

Namun demikian, setelah terdepresiasi di akhir Tahun 2022, pada 22 Februari 2023 tercatat mata uang rupiah terhadap USD mulai terapresiasi menjadi sebesar Rp 15.254. Tren kurs mata uang rupiah terhadap USD sudah menunjukkan penurunan di awal tahun 2023. Rupiah yang terus menguat ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Tidak hanya di Indonesia, apresiasi mata uang negara-negara lainnya juga mengalami apresiasi, seperti Thailand, Tiongkok, Korea Selatan dan India.



Sumber: Bloomberg, 2023. *Data per Januari 2023

Gambar 11. Depresiasi Mata Uang Terhadap USD 2023 (% y-t-d)

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan Rupiah terus menguat sejalan prospek ekonomi yang semakin baik dan

fundamental ekonomi yang kuat, sehingga akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi *term deposit* valas Devisa Hasil Ekspor sesuai dengan mekanisme pasar.

Hadirin yang saya hormati....

Mempertimbangkan berbagai kondisi perekonomian global dan berbagai tantangan yang akan di hadapi ke depan, berbagai organisasi global telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2023. World Bank, International Monetary Fund, dan Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 4,80 persen, sedangkan *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan hanya sebesar 4,70 persen. Namun demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan mencapai hingga 5 persen. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 4,50 hingga 5,30 persen, Kementerian Keuangan memproyeksikan sebesar 5,30 persen, dan Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan sebesar 5,30 hingga 5,50 persen. Optimisme ini didorong oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

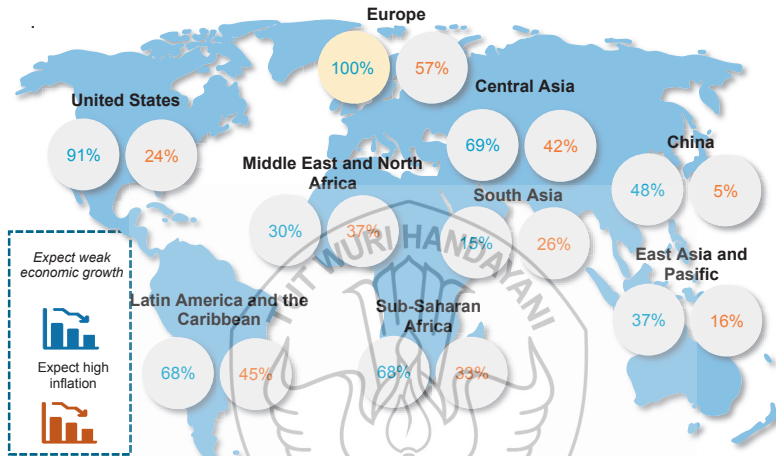
Tantangan dan Risiko yang Akan Dihadapi

Hadirin yang dirahmati Allah...

Di tahun ini kita akan menghadapi berbagai tantangan global yang perlu untuk diwaspadai. Pemerintah dan Stakeholder

harus saling bahu membahu untuk menghadapi tantangan berat di tahun ini.

Tantangan pertama adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih *gloomy*. Adapun titik terang yang potensial akan terjadi apabila tingkat inflasi mereda dan membaiknya sentimen konsumen.



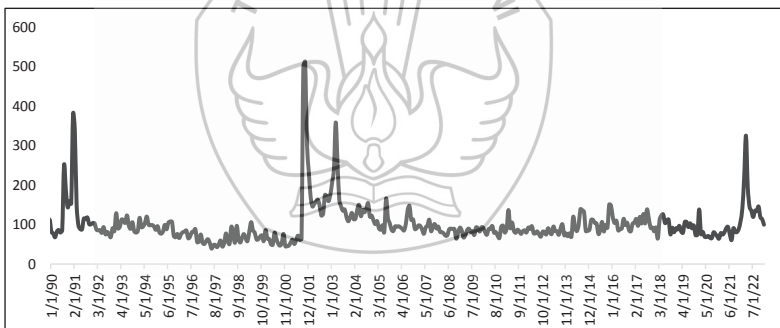
Sumber: World Economic Forum, 2023

Gambar 12. *Expectations of Stagflation Risk Across Regions*

Sementara, gambaran global secara keseluruhan suram dan hampir 20 persen responden dari ekonom dunia melihat peluang yang sangat mungkin terjadi resesi global dua kali lipat jumlahnya dari survei sebelumnya pada bulan September. Mayoritas ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang moderat atau kuat di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, namun pertumbuhan ekonomi yang melemah terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Krisis biaya hidup masih akan membayangi dan akan mempengaruhi banyak orang. Melonjaknya biaya pangan akan secara tidak proporsional mempengaruhi

negara-negara berpenghasilan rendah, dengan lebih banyak orang yang menghadapi kerawanan pangan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dihadapkan pada keputusan sulit. Pembuat kebijakan menghadapi dilemma pengetatan kebijakan apakah terlalu ketat atau sedikit ketat.

Tantangan kedua adalah tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda akan berhenti. Ketegangan antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak Tahun 2013 dan pada Februari 2022, Rusia mengumumkan invasinya terhadap Ukraina. Pada bulan Maret hingga Desember 2022 terjadi berbagai peristiwa sebagai akibat dari tensi geopolitik ini dimana negara-negara di dunia utamanya Amerika Serikat dan negara Kawasan Eropa memberikan sanksi kepada Rusia.



Sumber: MatteoIacoviello, 2023

Gambar 13. *Geopolitical Risk Index*

Sanksi tersebut berupa pengenaan batas atas harga yang diberikan kepada minyak Rusia, sementara itu Rusia membalas sanksi tersebut dengan pembatasan ekspor minyak dan gas yang mengakibatkan lonjakan harga energi dan tekanan inflasi. Hingga saat ini ketegangan geopolitik masih berlangsung dan masih belum terlihat kapan tensi geopolitik ini berakhir, sehingga menjadi salah

satu tantangan berat di tahun ini, karena tensi geopolitik ini dapat menyebabkan ketidakpastian global, tekanan inflasi, gangguan pasokan pangan dunia, hingga krisis pangan.

Tantangan ketiga adalah inflasi yang masih tinggi, namun diperkirakan akan menurun seiring dengan melemahnya permintaan global. Sekitar 84 persen negara diperkirakan mengalami inflasi yang lebih rendah pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Inflasi global diperkirakan turun dari 8,8 persen pada Tahun 2022 (rata-rata tahunan) menjadi 6,6 persen pada Tahun 2023 dan 4,3 persen pada Tahun 2024.

1. Di negara maju, inflasi rata-rata tahunan diproyeksikan menurun dari 7,3 persen pada 2022 menjadi 4,6 persen pada 2023 dan 2,6 persen pada 2024.
2. Di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, proyeksi inflasi tahunan turun dari 9,9 persen pada 2022 menjadi 8,1 persen pada 2023 dan 5,5 persen pada 2024.
3. Di negara berkembang berpenghasilan rendah, inflasi diproyeksikan akan moderat dari 14,2 persen pada Tahun 2022 menjadi 8,6 persen pada Tahun 2024.

Proyeksi Penurunan inflasi ini mencerminkan adanya penurunan harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar internasional karena melemahnya permintaan global.

Tantangan keempat adalah permintaan global yang melemah berdampak pada kinerja bisnis global. Permintaan global yang lemah dipandang sebagai tantangan terbesar yang harus diatasi dunia bisnis pada Tahun 2023, diikuti oleh biaya pinjaman yang tinggi, biaya input yang tinggi, dan keterbatasan keterampilan sumberdaya manusia. Disisi lain, tren geopolitik yang masih belum mereda serta isu ancaman resesi menjadi faktor utama yang memperburuk aktivitas ekonomi global. Di Tahun 2023, dunia bisnis memiliki berbagai respons dalam menghadapi hambatan perekonomian yang terjadi pada Tahun 2023 diantaranya

mengurangi biaya dengan memotong biaya operasional, mengurangi biaya dengan merumahkan pekerja, serta respons yang lebih positif adalah mereka akan mengoptimalkan *supply chain*.

Tantangan kelima adalah masih belum adanya tanda bahwa The Fed akan menurunkan *Federal Funds Rate* pada 2023 sehingga kebijakan moneter masih belum longgar di tahun ini. Bank sentral di seluruh dunia sedang berjuang dalam menurunkan inflasi yang cukup tinggi. Bloomberg memprediksikan bahwa The Fed akan melanjutkan pengetatan kebijakan di awal Tahun 2023. Bloomberg juga memperkirakan bahwa suku bunga global akan mencapai puncaknya pada kuartal ketiga 2023 sebesar 5,8 persen (tertinggi sejak tahun 2021). Keputusan kebijakan moneter yang diambil para pemangku kepentingan menjadi lebih sulit karena suku bunga berisiko membatasi permintaan sehingga ekonomi jatuh ke dalam resesi. The Fed diprediksikan akan menurunkan suku bunganya sebelum akhir tahun 2023.

Tantangan keenam adalah penurunan harga komoditas global yang akan berdampak pada kinerja ekspor nasional sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami perlambatan. Beberapa komoditas global yang merupakan komoditas utama ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan harga disebabkan oleh penurunan permintaan global seiring dengan ketidakpastian global, isu resesi dan stagflasi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja terhadap ekspor Indonesia. Ekspor menjadi salah satu kontributor utama PDB Indonesia sehingga apabila kinerja ekspor menurun akan berdampak pada perlambatan ekonomi nasional.

Tantangan ketujuh adalah sektor UMKM global masih mengalami *big problem yaitu fighting to survival*. UMKM cenderung lebih rapuh secara finansial, memiliki cadangan kas yang lebih kecil, kemampuan rantai pasokan yang lebih lemah, serta penyerapan teknologi digital yang lebih rendah.

Hal ini menyebabkan UMKM berada di garis terdepan dalam menghadapi berbagai jenis turbulensi dan guncangan. UMKM berjuang sangat keras untuk bertahan semasa pandemi, namun UMKM masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan diantaranya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, krisis energi dapat menyebabkan hiperinflasi, permintaan yang tinggi untuk *sustainability product*, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang cepat. Berbagai ketidakpastian ini membutuhkan kapasitas adaptasi yang tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh World Economic Forum menunjukkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM diantaranya:

1. Sebesar 67 persen UMKM kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, mereka kesulitan untuk meningkatkan keuntungannya sehingga keuntungan yang mereka dapatkan stagnan rendah, mereka juga mengalami tantangan untuk meningkatkan skala usahanya serta memperluas pasar dan mendapatkan konsumen baru;
2. Sebesar 48 persen UMKM kesulitan dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang dimiliki, mereka memiliki keterbatasan untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan sumberdaya manusia yang ada. UMKM mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan dengan bakat/ketrampilan/keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat bertahan lama di dalam perusahaan;
3. Sebesar 34 persen UMKM mengalami kesulitan dalam mempertahankan budaya, tujuan, dan nilai perusahaan;
4. Sebesar 25 persen UMKM mengalami kesulitan dalam memiliki produk dan inovasi yang sesuai dengan tuntutan teknologi saat ini dari pasar, mengembangkan dan menerapkan proses teknologi seperti otomatisasi, dan kepedulian terhadap transformasi digital;

5. Sebesar 24 persen UMKM mengalami kesulitan dalam sumberdaya keuangan dan mengakses pendanaan yang terjangkau; dan
6. Sebesar 22 persen UMKM mengalami kesulitan yang disebabkan oleh dampak dari kebijakan misalnya peraturan pajak, inflasi yang tinggi, birokrasi yang sulit, korupsi, kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai peraturan dan memenuhi peraturan yang relative berubah-ubah.

Inklusi Keuangan Digital dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kebangkitan UMKM

Hadirin yang saya muliakan...

Sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh dunia secara keseluruhan dan Indonesia pada khususnya, maka diperlukan langkah yang strategis dalam menghadapinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui akselerasi dalam inklusi keuangan digital.

Istilah *financial inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren pascakrisis Tahun 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit Tahun 2010, dengan dikeluarkannya *9 Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework*.

Beberapa manfaat inklusi keuangan diantaranya:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi;
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan;
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*;
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan;
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan;
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia;
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan; dan
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Inklusi keuangan kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi digital sehingga menjadi “inklusi keuangan digital”. Presiden World Bank Group menyatakan bahwa “akses universal ke layanan keuangan dapat dijangkau berkat teknologi baru, model bisnis transformatif, dan reformasi yang ambisius. Pada awal Tahun 2020, instrumen seperti rekening *e-money*, bersama dengan kartu debit dan rekening bank reguler berbiaya rendah, dapat secara signifikan meningkatkan akses keuangan bagi mereka yang sekarang tersisih”.

Inklusi keuangan digital melibatkan penyebaran sarana digital yang hemat biaya untuk menjangkau populasi yang saat ini tidak terlayani secara finansial dan kurang terlayani dengan berbagai layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terlihat prospek menjangkau miliaran nasabah baru, bank dan berbagai lembaga non-bank telah mulai menawarkan layanan keuangan digital bagi masyarakat yang tidak terlayani secara finansial dan kurang terlayani, dengan mengembangkan pendekatan digital yang telah digunakan selama bertahun-tahun

untuk meningkatkan saluran akses bagi mereka yang telah dilayani oleh sektor keuangan formal. Layanan keuangan digital termasuk yang melibatkan penggunaan ponsel kini telah diluncurkan di lebih dari 80 negara, dengan beberapa di antaranya telah mencapai skala yang signifikan. Sebagai hasilnya, jutaan nasabah miskin yang sebelumnya tidak terlayani dan kurang terlayani beralih dari transaksi berbasis uang tunai ke layanan keuangan formal, pembayaran, transfer, tabungan, kredit, asuransi, dan bahkan sekuritas dengan menggunakan ponsel atau teknologi digital lainnya.

Komponen-komponen penting dari inklusi keuangan digital adalah sebagai berikut:

1. **Platform transaksi digital** yang memungkinkan nasabah untuk melakukan atau menerima pembayaran dan transfer serta menyimpan nilai secara elektronik melalui penggunaan yang terhubung ke bank atau non-bank secara legal.
2. **Perangkat yang digunakan** berupa perangkat digital (seperti ponsel) yang dapat mengirimkan informasi atau instrumen (misalnya kartu pembayaran) dan terhubung ke perangkat digital seperti terminal *Point-Of-Sale* (POS).
3. **Agen ritel yang memiliki perangkat digital** yang terhubung ke infrastruktur komunikasi untuk mengirimkan dan menerima rincian transaksi memungkinkan pelanggannya untuk mengubah uang tunai menjadi nilai yang tersimpan secara elektronik ("*cash-in*") dan mengubah nilai yang tersimpan kembali menjadi uang tunai ("*cash-out*").
4. **Layanan keuangan tambahan** melalui platform transaksional digital dapat ditawarkan oleh bank dan non-bank kepada masyarakat yang tidak terlayani secara finansial dan kurang terlayani dalam bentuk layanan kredit, tabungan, asuransi, dan bahkan sekuritas. Layanan keuangan sering kali

mengandalkan data digital untuk menargetkan pelanggan dan mengelola risiko.

Bagi 2,5 miliar orang dewasa yang bertransaksi secara eksklusif dalam bentuk tunai karena kurangnya akses yang efektif kelayanan keuangan formal, memiliki akses digital ke layanan keuangan dapat menjadi sesuatu yang transformasional. Manfaat inklusi keuangan digital bagi mereka yang tidak terlayani secara finansial dan kurang terlayani adalah sebagai berikut:

1. **Mendapatkan akses ke layanan keuangan formal**, seperti pembayaran, transfer, tabungan, kredit, asuransi, sekuritas, dan lainnya. Migrasi ke layanan berbasis rekening biasanya berkembang seiring berjalannya waktu karena nasabah mulai terbiasa dan percaya pada platform transaksi digital. Selain itu, pembayaran dari pemerintah ke orang, seperti bantuan tunai bersyarat, yang dapat mengaktifkan rekening simpanan digital dapat memberikan jalan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk masuk ke dalam sistem keuangan.
2. **Biaya platform transaksional digital yang lebih rendah** baik bagi penyedia maupun pelanggan. Hal ini dapat memungkinkan pelanggan bertransaksi bahkan dalam jumlah yang kecil, sehingga membantu dalam *tracking* dan mengatur keuangan.
3. **Memungkinkan adanya layanan keuangan tambahan** yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan keuangan pelanggan.
4. **Mendorong pemberdayaan ekonomi** dengan memungkinkan akumulasi aset dan mendorong pemberdayaan bagi perempuan melalui peningkatan partisipasi ekonomi mereka.
5. **Meningkatkan keamanan keuangan tunai** karena berkurangnya risiko kehilangan, pencurian, dan kejahatan keuangan lainnya yang ditimbulkan oleh transaksi berbasis uang tunai.

Berdasarkan berbagai penelitian, inklusi keuangan digital berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi pelaku usaha, inklusi keuangan digital dapat mengurangi informasi asimetri sehingga mereka dapat dengan mudah meningkatkan akses layanan keuangan untuk memperbesar skala ekonomi mereka. Keterhubungan pada layanan keuangan digital pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan dan outputnya karena penjualan dapat dilakukan secara daring dengan pembayaran berbasis digital. Pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan investasi karena biaya menggunakan basis keuangan digital yang lebih rendah. Adanya peningkatan skala ekonomi secara digital maka dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Di sisi lain, bagi masyarakat, inklusi keuangan digital juga dapat mengurangi informasi asimetri sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses layanan keuangan (menabung, membayar tagihan, berbelanja, dan lain sebagainya). Adanya inklusi keuangan digital memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli barang dan membuka peluang investasi. Inklusi keuangan digital juga dapat mendorong masyarakat dalam berinovasi sehingga muncul berbagai *start up* dan usaha usaha baru yang dapat berdampak pada penurunan ketimpangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *multiplier effect* dari adanya inklusi keuangan digital tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat inklusifitas antar negara dan wilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah infrastruktur, ketimpangan, penggunaan alat komunikasi, *financial depth*, pendapatan, pendidikan, dan status kesehatan bank di wilayah tersebut.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, inklusi keuangan digital berdampak besar terhadap kebangkitan UMKM melalui:

1. Mengurangi informasi asimetri
2. Biaya transaksi yang rendah
3. Komunikasi dan transaksi yang cepat baik dengan pemasok maupun pembeli
4. Mendorong UMKM naik kelas menjadi eksportir dan terhubung ke pasar global
5. Memudahkan akses sumberdaya keuangan ke bank maupun non bank
6. Mendorong dan memperluas akses inovasi bisnis
7. Meningkatkan pendapatan melalui sistem pembayaran dengan mudah
8. Memudahkan berinvestasi dan memperluas usaha

Berbagai dampak yang dihasilkan oleh inklusi keuangan digital ini dapat membantu UMKM utamanya dalam Pengembangan bisnisnya sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Hadirin yang saya hormati...

Di berbagai Negara telah memberikan bukti konkret mengenai dampak dari inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

1. **China**

Inklusi keuangan digital memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan wilayah, pengembangan inklusi keuangan digital di China bagian timur, tengah, dan barat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Adapun strategi Pemerintah China dalam meningkatkan inklusi keuangan digital adalah:

- a) Mengeluarkan *Plan for Advancing the Development of Financial Inclusion* (2016–2020)
- b) Bank Sentral mengeluarkan kebijakan pengurangan rasio cadangan wajib yang dialihkan untuk melayani ekonomi riil termasuk inklusi keuangan.
- c) Memberikan fasilitas pinjaman dan potongan harga untuk mempromosikan inklusi keuangan.
- d) Memberikan subsidi dan potongan pajak agar UMKM dapat mengembangkan usaha dengan inklusi keuangan digital.
- e) Mendorong adanya departemen inklusif di bank komersil dan melakukan Evaluasi inklusifitas.

2. **India**

Inklusi keuangan telah menjadi paradigma yang berkembang dari pertumbuhan ekonomi yang memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengentasan kemiskinan di India. Adapun strategi Pemerintah India dalam meningkatkan inklusi keuangan digital adalah:

- a) Perdana Menteri Narendra Modi (PMJDY) merupakan misi nasional inklusi keuangan untuk menjamin akses layanan keuangan.
- b) Teknologi Digital India telah membantu meningkatkan inklusi keuangan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*).
- c) Pinjaman sektor prioritas dengan tujuan utama untuk memastikan dapat menjadi alat bagi bank India dalam memanfaatkan peluang bisnis yang belum dimanfaatkan di antara bagian masyarakat yang dikecualikan secara finansial.
- d) Literasi finansial yaitu pendidikan keuangan yang dapat membantu konsumen untuk mengelola risiko keuangan dengan memastikan bahwa konsumen dapat menilai lebih baik kapasitas mereka dalam membelanjakan,

menabung, meminjam, serta memilih layanan keuangan yang sesuai. Bank Sentral India telah membuat program literasi keuangan terkait dengan kesadaran tentang produk dan layanan keuangan, praktik layanan keuangan yang baik, digitalisasi keuangan, dan perlindungan konsumen khususnya di sektor keuangan.

3. **Thailand**

Fleksibilitas akses keuangan menyebabkan peningkatan akses kelayanan kredit dan pertumbuhan yang cepat dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam Perekonomian di Thailand. Adapun strategi Pemerintah Thailand dalam meningkatkan inklusi keuangan digital adalah:

- a) Pengembangan infrastruktur yang dapat dioperasikan yang merupakan fondasi utama ekonomi digital.
- b) Pengenalan undang-undang dan peraturan yang mendukung dan membantu mendorong inovasi *FinTech*.
- c) Promosi literasi keuangan diberbagai lini bagi masyarakat di berbagai tahap kehidupan.

Dampak inklusi keuangan digital terhadap kebangkitan UMKM juga terjadi di berbagai negara diantaranya:

1. **Kenya**

Layanan keuangan digital merupakan faktor penting dalam memastikan pertumbuhan UKM di Kenya. Hal ini dikarenakan konsumen semakin mengenal berbagai sistem pembayaran yang tersedia dan mendorong lebih banyak transaksi, khususnya transaksi dengan UMKM.

2. **India**

Inklusi keuangan digital di India terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Mengingat populasi India sangat tinggi sehingga potensi konsumsi juga tinggi, maka transaksi akan meningkat jika kemudahan bertransaksi terjadi.

3. **Afrika**

Perusahaan kecil dan rumah tangga berpendapatan rendah dapat langsung memanfaatkan solusi digital seperti layanan mobile money, perbankan online, dan inovasi teknologi keuangan lainnya untuk meningkatkan penjualan.

4. **China**

Inklusi keuangan digital dan dapat memberikan dukungan keuangan yang stabil untuk pertumbuhan usaha kecil dan mikro yang berkelanjutan, dan mewujudkan pembangunan usaha mikro dan ekonomi makro yang sehat.

5. **Uganda**

Literasi keuangan berdampak pada peningkatan implementasi inklusi keuangan digital yang dilakukan oleh UMKM sehingga dapat meningkatkan bisnis mereka.

6. **Mesir**

Inklusi keuangan digital dirancang untuk menarik UKM baik dari sisi permintaan (pengguna jasa keuangan misal untuk metode pembayaran) maupun penawaran (akses keuangan) sehingga dapat meningkatkan skala bisnis mereka dan mendorong tumbuhnya UMKM baru.

Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil membangun UMKM nya menjadi industri besar dengan konsep bisnis yang dikenal sebagai “*Kairetsu dan Zaibatsu*” serta digitalisasi keuangan yang terus berkembang:

1. ***Keiretsu***

Keiretsu merupakan perusahaan-perusahaan yang saling menjalin hubungan bisnis satu dengan lainnya berlandaskan kesamaan nilai budaya. Budaya Jepang mempengaruhi bentuk budaya korporasi perusahaan di mana nilai-nilai budaya seperti kelompok, jangka panjang dan hirarki mewarnai berbagai aspek pengelolaan bisnis. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia seperti *shushin koyo* (bekerja sampai dengan pensiun)

dan *nenko joretsu sei* (sistem senioritas); maupun pengelolaan keuangan (sistem bank utama), pemasaran (penguasaan pangsa pasar) dan produksi (*kanban system, kaizen*) merupakan implementasi ketiga variabel budaya korporasi. *Keiretsu* memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Jepang selama periode pasca perang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. **Zaibatsu**

Zaibatsu berasal dari kata '*zai*' yang berarti uang atau kekayaan, dan '*batsu*' yang berarti klan. Singkatnya, *zaibatsu* bisa diartikan sebagai klan kaya. Sejak masa Kekaisaran Meiji, *zaibatsu* merupakan istilah Jepang untuk konglomerasi industri dan bisnis keuangan. Jika ditelaah, *zaibatsu* adalah grup bisnis keluarga yang terdiri dari perusahaan induk yang mengerami anak usaha lainnya. Beberapa *zaibatsu* bahkan memiliki sebuah bank untuk mengelola perputaran uang induk dan anak usahanya sendiri. Kontribusi golongan *Zaibatsu* dalam perkembangan ekonomi Jepang khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Meiji adalah berhasil membangun dan meningkatkan perkembangan industri Jepang. *Zaibatsu* juga meningkatkan nilai ekspor-impor Jepang serta membuat Jepang memegang peranan penting dalam perekonomian dunia. Selain itu, *Zaibatsu* dengan banyaknya perusahaan yang didirikan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah perekrutan tenaga kerja.

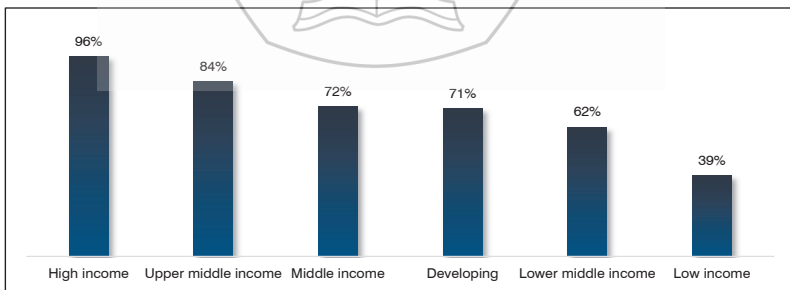
Kairetsu dan Zaibatsu dapat menjadi *benchmarking* yang dapat diterapkan yaitu dengan **merger UMKM didukung oleh lembaga keuangan terkait** dalam membantu proses bisnis UMKM. Namun demikian, **peran teknologi baru dan model bisnis yang inovatif** sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses UMKM ke dalam layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang:

- Meningkatkan pinjaman tradisional dengan menggunakan teknologi baru dan *big data*.
- Memperluas alat pendanaan, termasuk pendanaan pasar modal.
- Meningkatkan fungsi konsultasi lembaga keuangan.
- Merancang peraturan yang sesuai untuk *fintech*.

Perkembangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Hadirin yang saya hormati...

Hingga Tahun 2021, perkembangan inklusi keuangan digital sangat pesat. Hal ini tercermin dari kepemilikan akun yang semakin tinggi di berbagai negara. Global Findex 2021 mendefinisikan kepemilikan akun sebagai kepemilikan akun individu atau milik bersama di lembaga yang diatur, seperti bank, credit union, lembaga keuangan mikro, kantor pos, atau penyedia layanan *mobile money*. Hingga Tahun 2021, sekitar 76 persen orang di seluruh dunia memiliki akun baik di bank atau lembaga keuangan non-bank, termasuk penyedia layanan uang seluler.



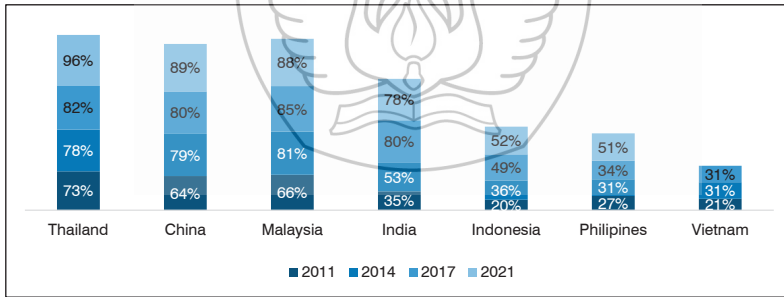
Sumber: World Bank, 2022. * Persentase Orang Dewasa yang Memiliki Akun (%).

Gambar 14. Kepemilikan Akun Berdasarkan Kelompok Pendapatan 2021

Negara berpendapatan tinggi cenderung memiliki jumlah kepemilikan akun yang tinggi. Artinya, semakin rendah kelompok

pendapatan suatu negara, akan semakin rendah jumlah orang yang memiliki akun sehingga semakin sedikit orang yang terhubung dalam inklusi keuangan digital. Berdasarkan data, terlihat bahwa pada negara berpendapatan tinggi terdapat 96 persen orang dewasa yang memiliki akun, sedangkan pada negara berpenghasilan rendah hanya terdapat 39 persen orang yang memiliki akun.

Namun demikian, meskipun kepemilikan akun meningkat secara rata-rata di negara berpenghasilan tinggi dan berkembang, tingkat pertumbuhan rata-rata di negara berkembang lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa, inklusi keuangan lebih berkembang pesat di negara berkembang dibandingkan negara maju. Misalnya, di India, kepemilikan akun meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dekade terakhir, dari 35 persen pada tahun 2011 menjadi 78 persen pada tahun 2021. Sedangkan, kepemilikan akun di Indonesia juga meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2021 setelah pandemi terjadi.



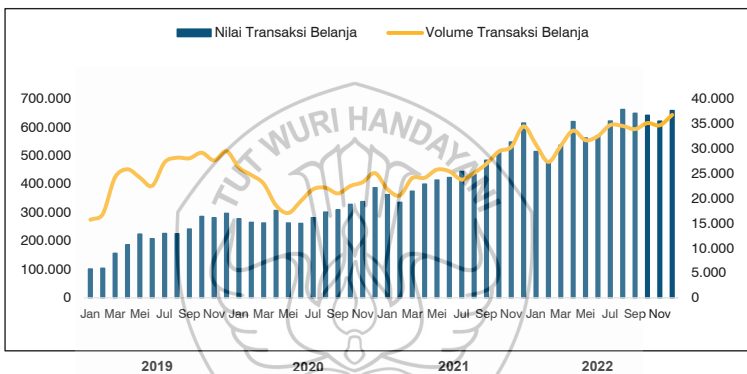
Sumber: The Global Findex, 2021.

Gambar 15. Perkembangan Kepemilikan Akun di Berbagai Negara

Hadirin yang saya muliakan...

Perkembangan akun yang pesat tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan kontak fisik sehingga mendorong banyak orang untuk memiliki akun dan dapat

bertransaksi secara digital. Hal ini juga dirasakan di Indonesia dimana penggunaan keuangan digital meningkat khususnya untuk transaksi dalam *eCommerce*. Berdasarkan The Global Findex tahun 2021, di Indonesia sebanyak 71 persen dari jumlah orang umur 15 tahun ke atas telah melakukan pembayaran dalam toko digital/*e-commerce* untuk pertama kalinya setelah COVID-19 dimulai dan sebanyak 66 persen dari jumlah orang umur 15 tahun ke atas telah melakukan pembayaran ke pedagang secara digital untuk pertama kalinya setelah COVID-19 dimulai.



Sumber: Bank Indonesia, 2023.

Gambar 16. Nilai dan Volume Transaksi Belanja E-Money (Rp Miliar, Ribu Transaksi)

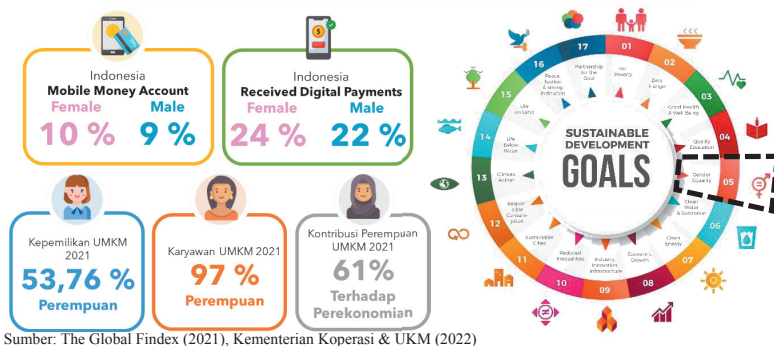
Berdasarkan data dari Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam belanja menggunakan *e-money* baik secara nilai maupun volume. Nilai transaksi belanja menggunakan *e-money* pada 2021 sekitar Rp 5.451 triliun sedangkan pada 2022 sekitar Rp 6.925 triliun atau meningkat sebesar 27,1 persen. Sedangkan volume transaksi belanja menggunakan *e-money* pada 2021 sekitar 305 juta transaksi dan pada 2022 sekitar 407 juta transaksi atau meningkat sebesar 33,4 persen. Peningkatan penggunaan *e-money* ini tentunya

sejalan dengan pengguna seluler di Indonesia yang mencapai 370,1 juta dengan penetrasi 133 persen serta pengguna internet yang mencapai 204,7 juta dengan penetrasi 74 persen.

Adapun nilai transaksi antar uang elektronik juga mengalami peningkatan yang signifikan mencapai Rp 177 triliun pada 2022 atau meningkat sebesar 357,2 persen. Sedangkan, nilai transaksi initial tertinggi terjadi pada Tahun 2021 pasca pandemi seiring dengan meningkatnya penggunaan keuangan digital, namun pada 2022 nilai transaksi initial masih tinggi yaitu mencapai Rp 8,1 triliun rupiah. Nilai transaksi reload/top up juga mengalami peningkatan pada 2022 mencapai Rp 532,8 triliun atau meningkat sebesar 37,8 persen.

Hadirin yang saya hormati...

Selain hal tersebut, Indonesia telah berhasil mencapai Sustainable Development Goals ke-5 yaitu Kesetaraan Gender dalam hal inklusi keuangan digital dan UMKM. Sustainable Development merupakan Agenda 2030 yang telah disepakati oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk memberikan cetak biru dalam perdamaian dan kemakmuran



Gambar 17. Peran Perempuan dalam Inklusi Keuangan Digital dan UMKM

bagi seluruh manusia di bumi baik di masa kini maupun di masa depan. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan seruan mendesak untuk dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang.

Keberhasilan Indonesia pada SDGs ke 5 yaitu kesetaraan gender dalam hal inklusi keuangan digital dibuktikan dari kepemilikan mobile money account antara perempuan dan laki-laki berdasarkan data The Global Findex Tahun 2021, dari jumlah orang usia di atas 15 tahun sebesar 10 persen perempuan telah memiliki *mobile money account*, sedangkan 9 persen laki-laki telah memiliki *mobile money account*. Selain itu, dari jumlah orang di atas 15 tahun ke atas sebesar 24 persen perempuan telah menerima pembayaran secara digital dan 22 persen laki-laki telah menerima pembayaran secara digital. Dari data ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia lebih mendominasi inklusi keuangan digital walaupun persentasenya tipis dengan laki-laki.

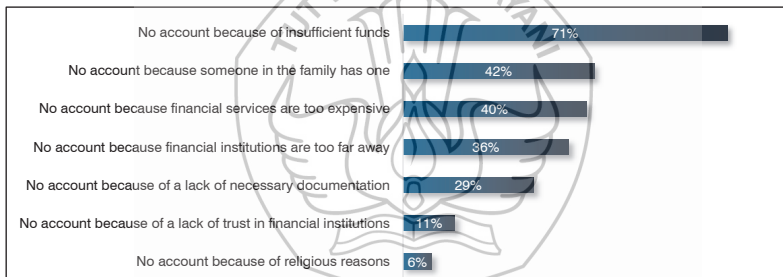
Di sisi lain, dalam hal UMKM terbukti pada Tahun 2021 sebanyak 53,76 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan dengan persentase karyawan UMKM perempuan sebesar 97 persen. Persentase keterlibatan perempuan dalam UMKM yang cukup tinggi ini mendorong perempuan yang terlibat dalam UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 61 persen.

Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Hadirin yang saya hormati...

Meskipun inklusi keuangan digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh inklusi keuangan di Indonesia.

Tantangan pertama, pada 2021, lebih dari separuh orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank di dunia tinggal di tujuh negara salah satunya Indonesia. Berdasarkan data dari Global Findex 2021 menunjukkan terdapat beberapa negara yang masih memiliki banyak orang dewasa yang *unbanked*, seperti di India, Pakistan, Bangladesh, China, Indonesia, Filipina, Myanmar, Nigeria, Brazil, Turki, dan Mesir. Hasil survei menunjukkan sebanyak 1,4 miliar orang dewasa beralasan mereka tidak memiliki rekening/akun bank dikarenakan rendahnya penghasilan mereka, jarak yang jauh ke lembaga keuangan, dan dokumen persyaratan yang tidak dimiliki. Hal ini tentunya akan menghambat perkembangan inklusi keuangan utamanya yang berbasis digital khususnya di Indonesia.



Sumber: The Global Findex, 2021

Gambar 18. Alasan Responden Tidak Memiliki Rekening Lembaga Keuangan di Indonesia Tahun 2021

Tantangan kedua, di Indonesia pertumbuhan kepemilikan rekening tidak begitu signifikan dikarenakan dana tidak mencukupi. Kepemilikan rekening lembaga keuangan dan kepemilikan kartu debit/kredit meningkat masing-masing hanya sebesar 3 persen dan 4 persen. Berdasarkan hasil survei, tiga alasan utama orang dewasa tidak membuka rekening dikarenakan (1) dana yang tidak mencukupi, (2) sudah ada anggota keluarga

yang memiliki, dan (3) layanan keuangan dirasa terlalu mahal. Hingga 2021, penggunaan rekening digital bagi orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening sebagai berikut:

1. Hanya sebesar 50 persen dari orang dewasa yang memiliki rekening menyimpan uang di Lembaga keuangan;
2. Hanya sebesar 23 persen dari orang dewasa yang memiliki rekening menggunakan ponsel atau internet untuk melakukan pembayaran, membeli barang, atau mengirim/menerima uang;
3. Hanya sebesar 18 persen dari orang dewasa yang memiliki rekening menggunakan ponsel atau internet untuk memeriksa saldo;

Masih rendahnya kepemilikan rekening dan penggunaan rekening dalam ponsel menunjukkan implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia yang masih belum optimal.

Tantangan ketiga, *e-money* yang digunakan mayoritas adalah *server based* dan *unregistered*, dengan ketimpangan penggunaan yang cukup tinggi antar wilayah. Meskipun penggunaan *e-money* di Indonesia didominasi oleh *server based*, namun mayoritas adalah *unregistered* (uang elektronik yang data identitas penggunaannya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit), sehingga sulit dipastikan apakah pihak yang mengajukan klaim adalah pemilik asli dari uang elektronik tersebut. Adapun, penggunaan *e-money* terlihat timpang di berbagai wilayah Indonesia, dimana penggunaan paling tinggi berada di DKI Jakarta dan yang paling rendah di Maluku dan Papua Barat.

Tantangan keempat, infrastruktur alat pembayaran baik menggunakan kartu maupun uang elektronik masih terpusat di Pulau Jawa. Secara total, terdapat sekitar 1,1 juta infrastruktur alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Namun demikian jumlah infrastruktur paling banyak berada di DKI Jakarta sekitar 320 ribu, Jawa Barat sekitar 188

ribu, Jawa Timur sekitar 122 ribu, Banten sekitar 103 ribu, dan Jawa Tengah sekitar 73 ribu. Sedangkan jumlah infrastruktur terendah berada di Sulawesi Barat sebesar 473, di Maluku Utara sebesar 801, di Kalimantan Utara sebesar 1.420, di Gorontalo sebesar 1.630, dan Papua Barat sebesar 2.108. Ketimpangan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor ketidakmerataan implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia.

Tantangan kelima, pada 2021 penerapan inklusi keuangan digital di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat perkotaan. Berbagai indikator menunjukkan persentase yang lebih besar di perkotaan dibandingkan pedesaan, diantaranya:

1. Jumlah akun *e-money* yang berada di perkotaan sebesar 12 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 4 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
2. Orang yang menyimpan uang menggunakan akun *e-money* di perkotaan sebesar 4 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 2 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
3. Orang yang menabung di lembaga keuangan dengan menggunakan *e-money* di perkotaan sebesar 23 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 15 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
4. Orang yang meminjam uang dari lembaga keuangan formal dengan menggunakan *e-money* di perkotaan sebesar 13 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 11 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
5. Orang yang melakukan atau menerima pembayaran digital di perkotaan sebesar 41 persen dari jumlah orang usia 15 tahun

ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 29 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.

6. Orang yang menggunakan ponsel atau internet untuk mengirim uang di perkotaan sebesar 10 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 3 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.

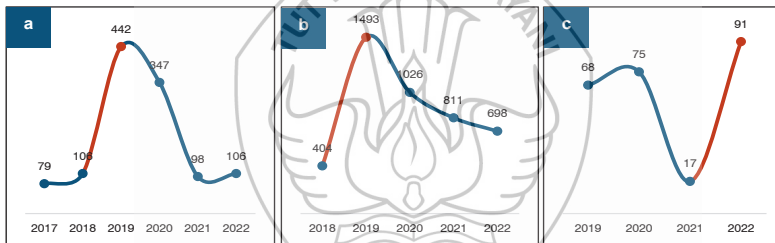
Tantangan keenam, pada 2021 gap penerapan inklusi keuangan digital di Indonesia antara perkotaan dan pedesaan masih relative tinggi. Berbagai indikator menunjukkan gap implementasi inklusi keuangan digital yang relatif tinggi, diantaranya:

1. Orang yang melakukan pembayaran digital di perkotaan sebesar 34 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 20 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
2. Orang yang menggunakan ponsel atau internet untuk membeli sesuatu secara online di perkotaan sebesar 21 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 12 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.
3. Orang yang menggunakan ponsel atau internet untuk membayar tagihan di perkotaan sebesar 10 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 4 persen dari jumlah orang usia 15 tahun ke atas.

Tantangan ketujuh, perkembangan inklusi keuangan digital dan e-Commerce tidak di barengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, menunjukkan bahwa usaha yang menjual produk melalui kanal digital menikmati penjualan 6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan menjual produk secara luring. Namun adopsi digitalisasi di sektor perdagangan lebih rendah dibandingkan

dengan sektor lainnya, hal ini mencerminkan sulitnya UMKM dalam mengadopsi digitalisasi dalam proses bisnisnya. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi kendala dalam menggunakan kanal digital dalam proses bisnisnya karena tidak memiliki kemampuan.

Tantangan kedelapan, kejahatan keuangan digital semakin meningkat dengan pesat. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan siber terbesar selama 2020 terjadi di sektor keuangan (23 persen), industri manufaktur (17,7 persen) dan sektor energi (10,2 persen). Data Kominfo menyebutkan bahwa sepanjang 2021 tercatat ada 888.711.736 ancaman siber di Indonesia. Angka ini setara dengan 42 ancaman siber per detik.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. **Panel a.** Investasi Ilegal yang Diberhentikan Oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) (Unit), **Panel b.** Pinjaman Online Ilegal yang Diberhentikan Oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) (Unit), **Panel c.** Gadaai Ilegal yang Diberhentikan Oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) (Unit)

Gambar 19. Jumlah Entitas Ilegal yang Diberhentikan oleh SWI

Ancaman serangan siber ini tentunya perlu dimitigasi guna meminimalisasi risiko kejahatan siber dan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) tahun 2020, estimasi total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber yang dialami sektor jasa keuangan secara global sebesar USD100 miliar atau lebih dari Rp 1.433 triliun.

Di Indonesia, Satgas Waspada Investasi (SWI) secara total telah menghentikan 895 entitas ilegal, dengan rincian 106 entitas

investasi ilegal, 698 pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan 91 entitas gadai tidak berizin. Total nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp106 triliun di 2022.

Arah Kebijakan Pemerintah dan Rekomendasi Kebijakan

Hadirin yang saya muliakan...

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam inklusi keuangan digital tersebut terus diupayakan untuk dimitigasi oleh Pemerintah. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan implementasi digitalisasi yang dapat mendorong inklusi keuangan digital.

Pertama, Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 diantaranya:

1. Kebijakan Moneter

Difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

2. Kebijakan Makroprudensial

Tetap didorong untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

3. Kebijakan Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem

pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah.

4. **Kebijakan Pendalaman Pasar Uang**

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. **Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau**

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Bauran kebijakan ketiga dan kelima dapat mendorong implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia.

Kedua, Pada 2019 Bappenas mengeluarkan 20 pilar dalam roadmap visi Indonesia 2045 yang terdiri dari:

1. Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
2. Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
3. **Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan**
4. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
5. Reformasi ketenagakerjaan
6. Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
7. Percepatan industri dan pariwisata
8. Pembangunan ekonomi maritim
9. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
10. Pemantapan ketahanan energi dan air
11. Komitmen terhadap lingkungan hidup

12. Percepatan pengentasan kemiskinan
13. Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
14. Pemerataan Pengembangan wilayah
15. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
16. Demokrasi substantif
17. Reformasi kelembagaan dan birokrasi
18. Penguatan system hukum nasional dan antikorupsi
19. Politik luar negeri bebas aktif
20. Penguatan ketahanan dan keamanan

Pilar ketiga juga berkontribusi dalam peningkatan implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia.

Dalam strategi transformasi Indonesia, terdapat 6 strategi besar yaitu:

1. SDM berdaya saing;
2. Produktivitas sektor ekonomi;
3. Ekonomi hijau;
4. Transformasi digital;
5. Integrasi ekonomi domestic;
6. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN);

Strategi keempat yaitu transformasi digital dapat mendukung peningkatan implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia.

Pemerintah juga memiliki 5 agenda prioritas di Tahun 2023 yaitu:

1. **Hilirisasi dan Industrialisasi Sumber Daya Alam**

Hilirisasi SDA menciptakan *multiplier effect* atau dampak berganda dari aktivitas hilirisasi industri yang telah terbukti nyata, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

2. **Optimalisasi Energi Bersih dan Ekonomi Hijau**

Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industrialisasi penghasil produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi *Green Industry Park* Terbesar di dunia.

3. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)**

Pembangunan ibu kota baru akan lebih masif dilakukan pada awal 2023. Tahap awal pembangunan difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan pembangunan Gedung perkantoran pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas hiburan.

4. **Penguatan Perlindungan Hukum, Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh konsumsi rumah tangga, ekspor/impor, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Jika situasi ekspor komoditas kembali dalam situasi normal dan beberapa negara masuk ke dalam resesi akan otomatis menurunkan demand. Sehingga inflasi dalam negeri akan naik, maka dari itu pemerintah harus memprioritaskan perlindungan sosial, hukum, dan ekonomi agar bisa meningkatkan kembali daya beli masyarakat

5. **Digitalisasi Ekonomi dan UMKM**

Pemerintah akan mengakselerasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai langkah menghadapi ancaman resesi 2023. Salah satu strategi utama dalam Pengembangan UMKM adalah Percepatan digitalisasi sehingga akan mendorong sektor UMKM dapat berkembang secara optimal seiring dengan meluasnya pasar. Kenaikan sector usaha menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi.

Agenda prioritas kelima dapat mendorong implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia.

Hadirin yang dirahmati Allah

Berikut rekomendasi arah kebijakan dan strategi ke depan yang perlu untuk dilakukan guna meningkatkan implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia. Rekomendasi arah kebijakan ke depan adalah:

“Mengakselerasi Transformasi Digital di Sektor Keuangan Guna Menciptakan Inklusi Keuangan Digital yang Merata dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Kebangkitan UMKM Nasional yang Berkelanjutan”

Strategi yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Perlunya sinergi dan harmoniasi kebijakan yang terkait dengan inklusi keuangan digital.
2. Penegakan regulasi khususnya bagi perusahaan/lembaga keuangan digital ilegal.
3. Tingkat Suku Bunga yang rendah dan stabil
4. Pemerataan infrastruktur digital.
5. Promosi dan kampanye pentingnya adopsi dan perluasan penggunaan QRIS yang menargetkan lebih banyak usaha khususnya UMKM.
6. Perlunya literasi keuangan digital kepada masyarakat.
7. Transformasi digital bagi UMKM berupa *digital process innovation*, *digital product innovation*, dan *digital business model innovation*. Serta belajar dari negara lain dalam membangun UMKM yang *profitable* dan menciptakan lapangan kerja, misalnya Jepang dengan *Keiretsu* dan *Zaibatsunya*, sehingga tidak hanya membangun UMKM berdasarkan pada teori dan *textbook*.
8. Lembaga Keuangan memberikan pelatihan bisnis dan keuangan digital bagi UMKM serta pemberian kredit modal bagi UMKM binaan dengan suku bunga rendah dan stabil.

9. Sosialisasi terkait dengan kemudahan akses layanan keuangan dan pembiayaan secara digital dapat melalui media cetak, elektronik, hingga sosial media. Terkhusus untuk kemudahan pembiayaan digital bagi UMKM utamanya perempuan dalam mendukung SDGs.
10. Memberikan subsidi kepada UMKM untuk pengembangan transaksi digital bagi UMKM.
11. Bank dan lembaga keuangan lainnya diharapkan dapat lebih menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pembayaran nontunai pada usaha retail atau besar di Indonesia, misalnya dengan memberikan diskon jika membayar menggunakan non-tunai, QRIS, *e-money* atau dompet digital. Hubungan atau kerjasama tersebut juga harus diterapkan pada pasar tradisional, toko besar, maupun toko kecil.
12. Transfer ke Daerah dalam bentuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu dapat dilakukan melalui transfer rekening bank/melalui *transfer mobile account* sehingga masyarakat kurang mampu dapat menjangkau layanan keuangan.
13. Memberikan penghargaan kepada lembaga keuangan yang paling banyak digunakan untuk *digital transaction*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup pidato pengukuhan ini, perkenankan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-NYA pada kami sekeluarga, sehingga atas kehendak dan takdir-NYA saya mendapatkan amanah menyandang Jabatan Guru Besar ini. Jabatan Guru Besar ini saya dapatkan atas dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati saya

menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pihak-pihak berikut:

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, **Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.**, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi **Prof. DR. Nizam, Ir., M.Sc.**, dan Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi **Dr. Sofwan Effendi, M.Ed** yang telah menyetujui pengusulan dan pengangkatan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, **Prof. Dr. M. Nasih, S.E., MT., Ak., CMA.**, para Wakil Rektor, **Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.**; **Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.**; **Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, drh., DEA.**; **Prof. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH., Ph.D.**, Sekretaris Universitas, Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si atas dukungan, kepercayaan, kesediaan, dan persetujuan pengusulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, **Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD-KGH., Finasim**, Sekretaris Senat Akademik dan Seluruh Anggota Senat Akademik serta para Guru Besar Universitas Airlangga, atas dukungan, kepercayaan, kesediaan dan persetujuan Pengusulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat, Direktur Sumber Daya Manusia, **Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., M.P dan staff tim PAK**, saya menghaturkan terimakasih telah membantu, memfasilitasi pengurusan, dan pengusulan Guru Besar saya ini. Yang tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan kepada TIM Percepatan Guru Besar Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Widji Suratni, DEA.**,

Apt, yang selalu memberikan semangat untuk mengusahakan tercapainya tujuan ini serta tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Tim Penilai Angka Kredit baik di tingkat Pusat, Universitas maupun Fakultas yang telah mereview berkas saya.

Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis **Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, M.Si., Ak., CMA**, Para Wakil Dekan **Dr. Wisnu Wibowo, S.E., M.Si**, **Dr. Nisful Laila, S.E M.Sc** dan **Dr. Ahmad Rizki Sridadi, S.H., MM** yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, dan bantuannya dalam proses pengusulan sampai pengukuhan hari ini.

Kepada yang terhormat, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, **Bambang Eko Afiatno, Ph.D.; Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., MSE.; Prof. Dra. EC. Dyah Wulansari, Ph.D; Prof. Rossanto Dwi Handoyo, S.E., M.Si., Ph.D.; Dr. Wisnu Wibowo, S.E., M.Si.; Dr. Deni Kusumawardani, S.E., M.Si.; Widya Silvy, S.E., M.Si., Ph.D.; Drs. Ec. Tri Hariyanto, Ph.D.; Rumayya, S.E., M.Reg.Dev., Ph.D.**; dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas motivasi, saran, serta dukungannya dalam pengusulan Guru Besar ini

Terimakasih Kepada Yth. **Ibunda Prof. Dr. Sri Maemunah Soeharto**, dan sahabat saya **Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari Rektor UNRIKA Batam**, yang tidak jemu-jemu selalu menanyakan dan mensupport saya untuk usulan Guru Besar.

Kepada yang terhormat, seluruh dosen, tenaga pendidik, dan staff akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada saya.

Kepada yang terhormat Bapak **H.M. Jusuf Kalla** sebagai Ketua IKA Universitas Hasanuddin juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 (masa jabatan 2004-2009 dan 2014-2019) merupakan kebanggaan kami alumni Fekon Unhas yang selalu saya kagumi dalam mengajarkan kebersahajaan dan

kesederhanaan serta kesempatan-kesempatan yang luar biasa ketika beliau menjabat Ketua IKA Universitas Hasanuddin. Para Guru Besar dan dosen-dosen saya Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Almarhumah **Prof. Dr. Kustiah Kristanto** Dekan Fekon Unhas Periode 1979-1984 selalu menginspirasi dan memotivasi saya semoga beliau dilapangkan alam kuburnya, **Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A** Rektor Universitas Hasanuddin Periode 1989-1997 juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Indonesia terakhir beliau menjabat Duta Besar Indonesia untuk Iran dengan ilmu-ilmu beliau yang tularkan kepada saya terutama Ekonometrika saat beliau menjabat Rektor beliau tidak pernah absen mengajar sungguh luar biasa tanggung jawab beliau sebagai seorang guru, **Bapak Dr. Abdul Madjid Sallatu, M.A** banyak ilmu yang diberikan pada saya terutama saat saya bekerja sebagai *Local Expert Australia Indonesia Patnership for Decentralisation (AIPD)* yang bekerjasama dengan BaKTI, **Prof. Dr. Marzuki, DEA.; Prof. Dr. Rahman Kadir** Dekan FEB Universitas Hasanuddin saat ini, **Kanda Prof. Dr. Nursini, Kanda Dr. Anas Iswanto Anwar Makatutu** Wakil Dekan Bidang Kerjasama selalu memberikan kesempatan pada saya sebagai penguji eksternal Program Doktoral FEB UNHAS, **Kanda Dr. Agussalim dan Dinda Dr. Sultan Suhab** terima kasih atas support dan do'a serta kolaborasinya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan dan perlindungan-NYA kepada semua guru-guru saya yang telah berjasa memberikan ilmu pada saya serta tak jemu-jemu terus selalu melibatkan saya untuk kemajuan negeri.

Kepada Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia **Bapak Perry Warjiyo, Ph.D; Dr. Solikin M.Johro** Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia,

Dr. Iskandar Simorangkir, Deputy Kemenko Perekonomian RI; **Bapak Dwi Pranoto** Assisten Governor-Head of Regional; **Dr. Arlyana Abubakar** KPw DKI Jakarta, **Dr. Yoga Affandi** Sekjen PP-ISEI juga sebagai Direktur Eksekutif Bank Indonesia Institute dan Pengurus PP-ISEI. Ibu **Idah Rosidah, Mas Aga, Mas Doni Septadijaya, Mas Danu Pradhana, Mas Febriansyah dan semua tim BI Insitute** atas kesempatan yang diberikan pada saya serta kerjasamanya yang baik selama ini. Juga sahabat-sahabat dosen Kebanksentralan PTN/PTS seluruh Indonesia terimakasih atas kebersamaannya selama ini sama-sama menimba ilmu Kebanksentralan di BI Institute.

Kepada Yth. Alm. **Prof. Dr. Nopirin, MA, Prof. Dr. Insukendro, MA** Guru Besar Universitas Gajah Mada, Terimakasih saya haturkan atas ilmu-ilmunya yang diberikan pada saya, Semoga Prof Nopirin dilapangkan alam kuburnya dan Prof Insukendro terus diberikan kesehatan. Serta juga seluruh sahabat-sahabat saya dosen-dosen muda UGM yang luar biasa Ustadz **Amirullah Setya Hardi, S.E, Ph.D** yang telah menyempatkan di tengah kesibukannya mereview orasi ilmiah saya; Bapak **Muhammad Edhie Purnawan, Ph.D** Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, serta dosen-dosen yunior yang luar biasa semua. Terimakasih atas kerjasama dan *sharing* ilmunya selama ini di BI Institute.

Ketua Bidang1 PP-ISEI **Dr. Anggito Abimanyu juga sebagai Kepala BPKH Periode 2017-2022** menghaturkan banyak terimakasih telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada saya untuk kontinyu melakukan riset Kajian Terapan ISEI dari awal Covid-19 sampai sekarang. Juga tim riset Kajian Terapan ISEI Index Ibu **Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D** Deputy Bidang Ekonomi Bappenas, serta **Dr. Nasrudin Djoko Surjono** Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta, **Mb Ayu, Mas Adit, Mas Bhayu dan Mas**

Satriyo, Mas Akbar terimakasih atas kerjasamanya yang baik selama ini sebagai Pengurus PP-ISEI Bidang 1 dalam tim Kajian Terapan ISEI.

Kepada yang terhormat **Kanda Dr. Iqbal Latanro** Komisaris Pefindo, dan **Kanda Asmawi Syam, S.E., MM** Ketua Komisaris Independen Bank BNI'46 sebagai pelindung PP-IKAFE Unhas terimakasih atas ilmu-ilmu yang ditularkan ketika saya menjadi mahasiswanya, Kanda **Hendra Noor Saleh, Doktor (c)** sebagai Ketua Umum IKAFE Universitas Hasanuddin yang juga sebagai Direktur Utama Dyandra Promosindo ; Sekjen IKAFE Unhas dinda **Suaib Mappasila, S.E** dan seluruh PP-IKAFE Unhas, baik penasehat, Pembina, maupun seluruh ketua Bidang maupun anggota, saya haturkan banyak terima kasih atas atensi dan kebersamaan dengan riang gembira selama ini.

Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih pada guru-guru saya mulai TK, Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga SMA terutama Bapak **Abdul Majid Hariadi, Bapak Helmi Alamri** atas ilmu-ilmu yang diberikan pada saya, serta do'a dan supportnya semoga menjadi Ilmu yang bermanfaat bagi saya dan menjadi ladang amal Jariyah buat bapak ibu guru sekalian.

Pada kesempatan ini, dengan tulus kasih sayang yang mendalam dan hormat, saya haturkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada **Alm. Ayahanda KH. Abdul Gaffar dan Almarhumah Ibunda Nyai Hj. Djamila** yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang dan do'a yang tiada pernah henti dan pengorbanan besar beliau demi keberhasilan putera putrinya dalam pendidikan. Kenangan yang tidak pernah ananda lupakan saat belaian tangan dingin ibunda selalu menyentuh kepala saya saat sepertiga malam, dan terutama Ilmu-ilmu agama yang telah ayah ibunda ajarkan kepada saya, InshaAllah menjadi ladang amal jariyah beliau berdua. Semoga Allah SWT memberikan ampunan dan tempat yang terbaik

di sisi-NYA. Tentunya ucapan terima kasih juga saya haturkan pada kedua Mertua saya **Alm. KH. M. Ilyas Baidhawi dan Almarhumah Ibunda Hj. Djuma'diyah** yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini.

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada suami saya **Ir. Achmad Sjaifudin, MT** yang penuh kesabaran selalu mendorong, menyemangati, dan memotivasi saya dalam menempuh pendidikan sejak S2 sampai S3, juga Putera saya **Mohammad Reyhan Nabiha**, terima kasih hiburan-hiburan yang diberikan pada Bunda sehari-hari dan maafkan Bunda bila kurang sempurna menemani ananda setiap hari karena banyak tugas-tugas sebagai abdi Negara yang mempunyai tanggung jawab moral kepada seluruh anak-anak didik yang harus rela meninggalkan keluarga. Semoga ananda menjadi insan yang beruntung, ditinggikan derajatnya dan dimuliakan dunia akhirat.

Juga ananda **Hilda Rohmawati, S.E., M.SE.** yang selalu menemani ibunya jika bertugas di Jakarta dengan sabar dan perhatian. Nanda **Shochrul Rohmatul Ajjah, S.E, M.Sc; Akhmad Hudaifah, S.E., M.Sc; Avianto Nugroho, S.E., M.El; Priadi Asmanto, S.E., MT**, Terimakasih atas do'a dan supportnya selama ini. Kalian anak-anakku yang hebat semoga tetap menjadi insan yang rendah hati dan selamat dunia akhirat.

Terimakasih juga atas dukungan dan kasih sayang yang selama ini diberikan oleh saudara kandung saya **Yunda Maburrah, Kanda Hasyim Gaffar, Kanda Ali Dafir** kenangan yang tak terlupakan sepanjang hidup saya dari masa kecil hingga masa kuliah serta seluruh keponakan dan seluruh keluarga besar dan semua saudara ipar saya.

Saya haturkan terima kasih pada seluruh kerabat, teman, sahabat terutama ganks Charisan dengan **Ibu Lisa JK dan Ibu Ira JK** yang selalu bersedia menjadi tempat berkumpul kami dengan canda tawa yang sangat menghibur dan menu-

menu yang selalu lengkap dan lezat baik di Jakarta maupun di London; **Mb Yuni Sukoco, Ibu Raida Syukur Ismunandar Dubes UNESCO Perancis, Bro Andi Hasrul, Mba Yanti, Titien Syukur, Chino, Bua Ira Gokal, ibu Vira Akbar, Adella Ranggong, Wenda Taufik, Mas Amal Haq, Bro Dating, Diraya Syamsudin** dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih do'a dan supportnya selama ini. Ternyata ucapan-ucapan guyon memanggil Prof sungguh menjadi kenyataan.

Terselenggaranya acara pada hari ini tidak lepas dari kerja sama yang luar biasa dari seluruh panitia, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas arahan dari Sekretaris Universitas Airlangga dan Ketua Panitia beserta seluruh panitia dan Tim Paduan Suara yang telah bekerja keras untuk acara Sidang Universitas ini. Semoga Allah SWT membalasnya berlipat ganda atas kebaikan yang saya terima.

Akhir kata kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersabar mendengarkan pidato pengukuhan Guru Besar pada hari ini, saya menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya dan disertai permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang luas kepada perkembangan ilmu pengetahuan, bangsa dan negara. Atas perhatiannya saya haturkan banyak terima kasih

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq...

Wassalamauaalaikum Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Awinja, N. N., & Fatoki, O. I. (2021). Effect of Digital Financial Services on the Growth of SMEs in Kenya. *African Journal of Empirical Research*, 2(1), 79–94. <https://doi.org/10.51867/ajer.v2i1.16>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Bank Indonesia. (2022). *Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% Dan Inflasi Akan Kembali Ke Dalam Sasaran 3,0±1% Pada Tahun 2023*. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx
- Bank Indonesia. (2023). *Bi 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 5,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Mendorong Pertumbuhan*. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_253823.aspx
- Bank Indonesia. (2020). *Keuangan Inklusif*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2023). *Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diperkirakan Kembali ke dalam Sasaran Pada 2023*. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx
- Bloomberg. (2023). *Global Central Banks Aren't Declaring Victory Over Inflation Yet*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-08/global-central-banks-aren-t-declaring-victory-over-inflation-yet>
- Boateng, K. (2018). Financial Inclusion For Economic Growth – An Overview Of Some Financial Inclusion Policies In India. *Kaav International Journal Of Economics, Commerce & Business Management*, 5(1), 53–59. http://www.inclusivefinanceindia.org/1111-publications%5Cnhttp://www.smartcampaign.org/storage/documents/what_happens_to_microfinance_clients_who_default_eng.pdf%5Cnhttp://tmgt.lsrj.in/UploadedArticles/337.pdf%5Cnhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@d

- Chen, W., & Yuan, X. (2021). Financial inclusion in China: an overview. *Frontiers of Business Research in China*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s11782-021-00098-6>
- Cihak, M., Mare, D. S., & Melecky, M. (2016). The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies. *The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies*, June. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7722>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2021). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*.
- Eldeeb, M. S., Halim, Y. T., & Kamel, E. M. (2021). The pillars determining financial inclusion among SMEs in Egypt : service awareness , access and usage metrics and macroeconomic policies. *Future Business Journal*. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00073-w>
- Falianty, T. A. (2023). *Outlook Perekonomian Indonesia 2023*.
- Goyal, R., Creane, S., Mobarak, A. M., & Sab, R. (2002). Financial Sector Development in the Middle East and North Africa. *IMF Working Paper*, WP/02/6(June), 555–582.
- Ika, S. (2022). *Kajian Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Kajian Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/30/2438-kajian-inklusi-keuangan-untuk-keadilan-dan-kemakmuran-rakyat-indonesia>
- International Monetary Fund. (2022). *Policymakers Need Steady Hand as Storm Clouds Gather Over Global Economy*. IMF. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/11/policymakers-need-steady-hand-as-storm-clouds-gather-over-global-economy%0A>
- International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook Update: Inflation Peaking Amid Low Growth. In *Report*. <https://doi.org/10.4324/9780429268175-39>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Pemerintah Berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Dalam Rangka Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Siaran Pers. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2023>

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2019). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Ringkasan Eksekutif. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan_Eksekutif_Visi_Indonesia_2045_Final.pdf)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Peraturan Presiden RI No.134 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240105/perpres-no-134-tahun-2022>
- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>
- Kim, J. H. (2016). A study on the effect of financial inclusion on the relationship between income inequality and economic growth. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(2), 498–512. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1110467>
- Kobugabe, C., Rwakihemb, J., & Kobugabe, C. (2022). Financial Literacy and Financial Inclusion : A positivist view of Proprietors of Small and Medium Enterprises in Fort Portal City , Western Uganda Financial Literacy and Financial Inclusion : A positivist view of Proprietors of Small and Medium Enterprise. *American Journal of Finance*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47672/ajf.1014>
- Levine, R. (2005). Chapter 12 Finance and Growth: Theory and Evidence. In *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1, Issue SUPPL. PART A, pp. 865–934). [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01012-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01012-9)
- Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes without outliers. *Journal of Monetary Economics*, 46(1), 31–77. <https://doi.org/10.1007/s10258-009-0035-y>
- Machasio, I. N. (2020). Covid-19 and Digital Financial Inclusion In Africa. *Africa Knowledge in Time Policy Briefs*, 4(1), 1–7. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34637/COVID-19-and-Digital-Financial-Inclusion-in-Africa-How-to-Leverage-Digital-Technologies-During-the-Pandemic.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Malik, A. (2023). *SWI Stop 895 Investasi, Pinjol dan Gadai Ilegal di 2022, Ini Modus Barunya*. Berita. <https://www.bareksa.com/berita/reksa->

- dana/2023-01-02/swi-stop-895-investasi-pinjol-dan-gadai-ilegal-di-2022-ini-modus-barunya
- Mehrotra, A., & James, Y. (2015). Financial inclusion – issues for central banks. *BIS Quarterly Review*, March(5), 83–96.
- Moenjak, T., Kongprajya, A., & Monchaitrakul, C. (2020). Fintech, Financial Literacy, and Consumer Saving and Borrowing: the Case of Thailand. In *ADB Working Paper Series* (Issue 1100).
- Nemoto, Naoko & Koreen Miriam. (2019). Digital Innovation Can Improve Financial Access for SMEs. SME Policy Faced With Development of Financial Technology G-20 Japan 2019 T-20. <https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/03/t20-japan-tf9-1-digital-innovation-improve-financial-access-smes.pdf>
- OECD. (2023). *Confronting the Crisis*. OECD Economic Outlook. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f6da2159-en/index.html?itemId=/content/publication/f6da2159-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan*. Aritikel. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/632/tantangan-dan-mitigasi-kejahatan-serta-peningkatan-keamanan-siber-di-industri-jasa-keuangan>
- Ravikumar, T. (2019). Digital financial inclusion: A payoff of financial technology and digital finance uprising in India. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3434–3438.
- Sarma, M., & Pais, J. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. In *Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi*, 168(10–13), 1–30. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). *Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju*. Berita. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-beberkan-lima-agenda-besar-indonesia-maju/>
- Tasmilah. (2022). Financial Inclusion and digital transformation: Efforts To Increase MSME Income. *Bank Indonesia*.
- U.S. Bureau of Labor Statistics. (2022). *The Economics Daily*. U.S. Bureau of Labor Statistics. <https://www.bls.gov/opub/ted/2022/consumer-prices-up-7-7-percent-over-year-ended-october-2022.htm>

- Van, L. T. H., Vo, A. T., Nguyen, N. T., & Vo, D. H. (2021). Financial Inclusion and Economic GROWTH: An International Evidence. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(1), 239–263. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1697672>
- Wang, X., & Guan, J. (2017). Financial inclusion: measurement, spatial effects and influencing factors. *Applied Economics*, 49(18), 1751–1762. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1226488>
- Wasiaturrahma, Wahyuningtyas, Y. T., & Ajija, S. R. (2019). Non cash payment and demand for real money in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1575>
- World Bank. (2020). *Digital Financial Inclusion*. Report. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/publication/digital-financial-inclusion>
- World Bank. (2023). *Sharp, Long-lasting Slowdown to Hit Developing Countries Hard*. Press Release. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/01/10/global-economic-prospects#:~:text=The global economy is projected,emerging market and developing economies.>
- World Economic Forum. (2023). *Recession in 2023? That depends on where you are in the world*. WEO. <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/global-recession-economic-outlook-2023/>
- World Economic Forum. (2022). *Future Readiness of SMEs and Mid-Sized Companies: A Year On*. Report. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_Readiness_of_SMEs_and_Mid_Sized_Companies_A_Year_On_2022.pdf
- World Economic Forum. (2023). *IMF: World economic outlook is starting to recover*. Agenda. <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/imf-global-growth-forecast-inflation-cools-inflation/>
- Yang, L., & Zhang, Y. (2020). Digital financial inclusion and sustainable growth of small and micro enterprises-evidence based on China's new third board market listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/su12093733>

RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Wasiaturrahma, S.E., M.Si
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 NIP : 196804191999032001
 NIDN : 0019046802
 Tempat & Tanggal Lahir : Sumenep, 19 April 1968
 E-mail : rahma@feb.unair.ac.id
 Cell : (+62)81 330 622 333
 Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
 Universitas Airlangga
 Jl. Airlangga No 4-6 Surabaya
 No Telp/Fax : (031)-5033642/Fax: (031)-5026288
 Alamat Rumah : Delta Puspa No.144 Deltasari Baru.
 Waru-Sidoarjo 61256
 Nama Suami : Ir. Achmad Sjaifudin, MT
 Nama Anak : M. Reyhan Nabiha

Riwayat Pendidikan

2005-2010 : Ilmu Ekonomi Pascasarjana
 Universitas Airlangga
 2000-2002 : Ilmu Manajemen Pascasarjana
 Universitas Airlangga
 1987-1991 : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Pendidikan Tambahan

- Tahun 2022 : *Workshop Reskilling Reviewer* Pengabdian Masyarakat (Internal Universitas Airlangga)
- Tahun 2021 : *E-Learning Course; Knowledge of Banknotes and the Characteristics of Euro Banknotes-ECB*
- Tahun 2015 : *Democratic Innovation Summer School: Skills for democratic Innovation and the Governance of the Future* (Kemendagri-University of Edinburgh UK)
- Tahun 2006 : TOT Kebanksentralan Bank Indonesia Insitute-Bali
- Tahun 2005 : *Edvanced Econometrics* (Universitas Airlangga)
- Tahun 2004 : *Input-Output* (Universitas Gajah Mada)
- Tahun 2004 : *Central Banking Curriculum Lecturing* (Bank Indonesia-Jakarta)
- Tahun 2004 : *The Intensive Leadership Training* (Universitas Indonesia)
- Tahun 2004 : *Econometrics-Time Series Models* (Universitas Indonesia)
- Tahun 2003 : *Structural Equation Modelling* (Universitas Airlangga)
- Tahun 2000 : *Islamic Economics* (Universitas Indonesia)
- Tahun 1999 : *Islamic Economics of Banking and Finance* (Bahrain Institute of Banking and Finance)

Riwayat Jabatan

- Tahun 2022 : Penasehat Koperasi Syariah IPHI Jawa Timur
- Tahun 2022 : Sebagai Asesor LAMEMBA
- Tahun 2021-2024 : Wakil Ketua Riset Kajian Terapan Bidang Organisasi PP-ISEI

- Tahun 2018 : Ketua Riset Kajian Terapan Bidang Organisasi PP-ISEI
- Tahun 2013 : Ketua Forum Kebanksentralan (Perguruan Tinggi Induk) PTN/PTS Indonesia
- Tahun 2014 : Pembina BMT Muda Surabaya
- Tahun 2013-2017 : Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB UNAIR
- Tahun 2011-2015 : *Local Expert: Australia-Indonesia Partnership For Desentralisation* - Aus Id
- Tahun 2006-2013 : Konsultan Koperasi Syariah, Dinas Koperasi Pemprov Jatim
- Tahun 2004 : Ketua Lembaga Micro Finance Universitas Airlangga
- Tahun 2001 : Ketua Lembaga Ekonomi Regional Universitas Airlangga

Pengalaman Nara Sumber/Speakers

1. Berbagai Seminar Nasional, Media Televisi Nasional Maupun Radio
2. Guest Lecture at University of Glasgow UK
3. Seminar Internasional Kangwon University Korea Selatan
4. Guest Lecture at Osaka University Japan
5. TOT Kebanksentralan PTN/PTS Se Indonesia-BI Institute di Bandung
6. Seminar Internasional at Universiti Teknologi Malaysia
7. Seminar Internasional at Nasional University of Singapore
8. Seminar Internasional at Chulalongkorn University Thailand
9. Seminar Internasional at University of Chittagong Bangladesh

**Publikasi Karya Ilmiah Melalui Jurnal Bereputasi -
(Scopus-Sinta) 5 Th Terakhir**

1. Services trade and infrastructure development: Evidence from African countries. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2143147>
2. The Impact of Rupiah-USD Exchange, on The Indonesian Manufacturing Sectors in 2005-2016. *Opcion, Ano36, Especial No.27(2020):1011-1030*. ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385
3. Impact of Village Funds and Number of Cooperatives on the Number of Poor Residents in East Java Province. *Iranian Economic Review*, 2022(3), 535–548. <https://doi.org/10.22059/IER.2021.79459>
4. The Efficiency of Indonesian Commercial Banks: Does the Banking Industry Competition Matter? *Sustainability (Switzerland)*, 14(17). <https://doi.org/10.3390/su141710995>
5. Analysis of the Effect of Non-Cash Payments on Cash Distribution in Indonesia, Period 2010-2015. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 11, Issue 9). www.ijicc.net
6. Evaluating financial performance of public cooperatives for women in east java, Indonesia. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8683–8689. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9951>
7. Evaluation of inclusive economic growth in East Java. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8690–8695. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9952>
8. Breadth and depth outreach of Islamic cooperatives: do size, non-performing finance, and grant matter? *Heliyon*, 6(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04472>
9. Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach. *Heliyon*, 6(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390>

10. *The Effect of Control Corruption, Political Stability, Macroeconomic Variables on Asian Economic Growth Control corruption index Political stability index* (Vol. 15, Issue 2). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>
11. Determinant of Indonesian Manufacturing Output. *Journal of Developing Economies*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jde.v3i1.8686>
12. The Influence of Macroeconomic Variables on Demand for Property Loans in Indonesia. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.31688.p-ISSN2541-1470-e-ISSN2528-1879>
13. The Effect of Macroeconomic Variables on Macprudential Indicators in Indonesia from The First Quarter of 2003 to the Fourt Quarter of 2013. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.www.ijicc.net.Volume11(9),623-640,2020
14. Productivity and Poverty Rural Farm Plants: Case Study in East Java. *International Journal of Management (IJM)* 11(8),694-708,220.ISSN Print:0976-6502 and ISSN Online:0976-6510.DOi:10.34218/IJM.11.8.2020.064
15. Analysis of the Effect on Non-Cash Payments on Cash Distribution in Indonesia, Period 2010-2015.*Intertional Journal of Innovation, Creativity and Change*.www.ijicc.net. Volume11.Issue 9,388-402,2020
16. How to Control the House Prices Through the Demand Sides? *Iranian Journal, University of Tehran*.ISSN:1026-6542.Volume 79-91
17. Icreasing Income of Traditional Fishermen Through Management Assistance In Fish Processing And Preservation for Fishermen's Wife In Kedungcowek Kenjeran Surabaya. (*Journal of Public Service*), 4, 361–368. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.361-360>

18. Peningkatan Kinerja Bank Sampah melalui Model Triple Helix. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>
19. Electronic Based Payment System And Economic Growth In Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.26287>
20. Analysis of the effect of bank size, credit risk, and capital adequacy on cost efficiency of banks in Indonesia (SFA method). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(Oktober), 321–336. www.ejournal.uksw.edu/jeb
21. Jakarta Islamic Index: Covid-19 Pandemic And potential Financial Distress. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(2), 210. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26147>
22. Dampak shock kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 243–258. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.5133>
23. The Impact Of Population Factors On Economic Growth Of Bangka Belitung Island - Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 280. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.28689>
24. Improving The Cooperative Performance Through Financial Management Assistance in Koperasi 64 Bahari Surabaya (2020)
25. Endogenous Growth Factors In Four Categories Of Countries Based On Human Development Index. *Jurnal Dimensi*, 11, 567–583. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>
26. Analysis of International Tourism Demand in Indonesia: An Ordinary Least Square (OLS) Approach. *JEE*, 10(2), 158–172. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec>
27. Economics Development Analysis Journal Multicollinearity in Tourism Demand Model : Evidence from Indonesia Article

- Info. *Economics Development Analysis Journal*, 10(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
28. Electronic Payment And Economic Growth In Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 6(2), 287. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.24923>
 29. Impact of Exchange Rate Volatility to Stocks' Return in Indonesia: The Augmented Markov-Switching Egarch Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 161–173. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.8781>
 30. Non Cash Payment and Demand for Real Money in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(1). <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1575>

Penulisan Buku

- Tahun 2022 : Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dari Masa ke Masa; ISBN: 9786236980811; CV.Selaras Media Kreasindo
- Tahun 2019 : Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah (Sumber Elektronik); ISBN: 9786239245146; Scopindo Media Pustaka
- Tahun 2018 : Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi; ISBN: 9786023366224; CV. Diandra Kreatif
- Tahun 2012 : Integrasi, Sinergi, dan Terobosan Pembangunan Daerah; ISBN: 9786028671880; PT Revka Petra Media
- Tahun 2011 : Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Perbandingan Sistem Ekonomi; ISBN: 9786029188325; UPN Press

**Matakuliah yang diampu di Semester Gasal/Genap
S1, S2 dan S3 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan
Pascasarjana:**

1. Ekonomi Moneter 1
2. Ekonomi Moneter 2
3. Ekonomi Moneter 3
4. Kebanksentralan
5. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
6. Ekonomi Moneter dan Perbankan
7. Filsafat Ilmu Ekonomi
8. Perekonomian Indonesia
9. Sejarah Pemikiran Ekonomi
10. Perbandingan Sistem Ekonomi

